

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Investasi menjadi salah satu bekal awal dalam pembangunan suatu negara dan memegang peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih dari sekadar suntikan modal, investasi merupakan katalisator bagi peningkatan produktivitas, transfer teknologi dan penciptaan inovasi yang berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan oleh peran investasi sebagai salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan nasional (Lestari et al., 2024).

Investasi yang masuk ke suatu daerah memiliki peran strategis tidak hanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan investasi mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, kemampuan daerah dalam menarik dan mempertahankan investasi menjadi indikator penting daya saing sekaligus keberlanjutan pembangunan yang dijalankan.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. DPMPTSP tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perizinan yang diberikan akan sangat menentukan minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, paradigma penyelenggaraan pemerintahan pun mengalami perubahan,

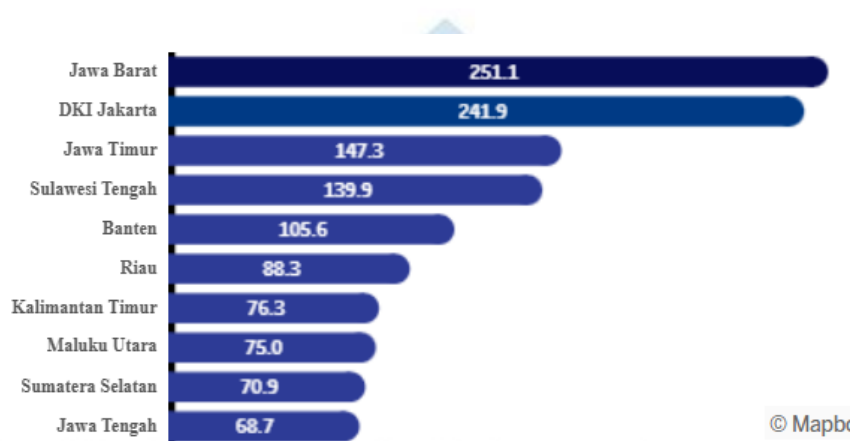
khususnya dalam bidang pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan transformasi digital guna mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi pelayanan publik menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui inovasi, penyederhanaan, dan percepatan pelayanan perizinan usaha yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah lembaga pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan terkait investasi yang menjadi wewenang daerah, bertujuan untuk mempermudah proses seperti perizinan, memberikan kepastian hukum dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga menarik investor/ pelaku usaha dalam penanaman modal (Bakri et al., 2022). Hal ini sesuai isi dalam UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal yang menjadi dasar hukum utama untuk investasi, sehingga DPMPTSP memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut melalui berbagai strategi atau kebijakan untuk diterapkan di suatu daerah.

Strategi dan program kerja DPMPTSP Kota Bandung diatur dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Bandung yang menjadi pedoman dalam mencapai target investasi daerah. DPMPTSP Kota Bandung memiliki strategi dan program kerja yang terfokus pada peningkatan investasi daerah melalui promosi yang efektif dan kolaborasi dengan instansi terkait. Rencana Strategis (Renstra) mereka mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi peluang investasi dan memfasilitasi proses perizinan yang lebih efisien.

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu pusat ekonomi utama Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan investasi menarik bagi pelaku usaha domestik (PMDN) maupun asing (PMA). Realisasi investasi Jawa Barat telah menunjukkan kinerja signifikan dari pemerintah dalam menarik investasi. Berikut ini jumlah investasi di Indonesia periode Januari – Desember 2024, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Grafik Sebaran Investasi Per Provinsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2024



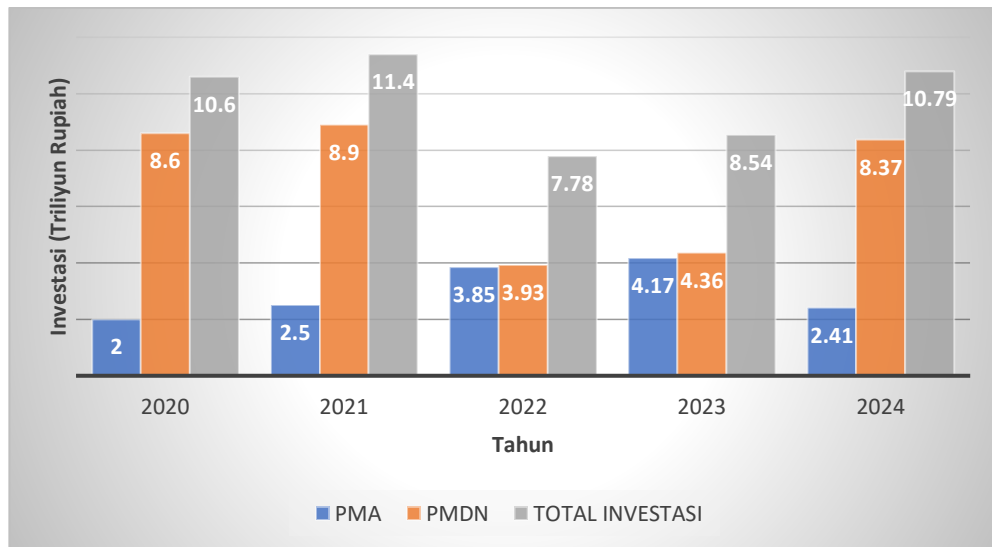
**Sumber:** Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa Jawa Barat menjadi peringkat pertama di tahun 2024 dengan jumlah investasi sebesar 251,1 Triliun, Hal tersebut mencerminkan bahwa Provinsi Jawa Barat menyimpan potensi investasi yang besar di tingkat provinsi. Selain di tingkat provinsi, salah satu Kota yang juga memiliki potensi yang besar adalah Kota Bandung.

Di tingkat kota, Bandung juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap investasi di Jawa Barat. Data terbaru yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan jumlah realisasi investasi di Kota Bandung mencatatkan tren positif. Sehingga Kota Bandung menjadi salah satu kota yang diminati para investor.

Data realisasi investasi di Dinas Penanaman Modal Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.2 Grafik Realisasi Investasi DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2020 - 2024**



Sumber: Web Resmi DPMPTSP (Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.2, data realisasi investasi di DPMPTSP Kota Bandung tahun 2020 hingga 2024 terdapat fluktuasi dalam jumlah investasi yang masuk. Mulai dari tahun 2020 dengan total 10,6 triliyun. Kemudian tahun 2021 mencatat total investasi tertinggi sebesar 11,4 triliyun, sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan signifikan menjadi 7,78 triliyun. Tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 8,54 triliyun. Pada tahun 2024, investasi kembali meningkat menjadi 10,79 triliyun, didorong oleh kenaikan investasi penanam modal dalam negeri (PMDN). Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam kebijakan investasi dan faktor eksternal yang mempengaruhi minat investor.

Realisasi investasi di Kota Bandung tahun 2024 berhasil melampaui target dengan perolehan sebesar Rp. 10,79 triliyun atau 147,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7,3 Triliyun. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan nilai investasi sebesar 26,36% dari capaian tahun 2023. Dengan

raihan investasi tersebut, Kota Bandung berhasil menyerap sebanyak 20.614 tenaga kerja. Penanam modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 18.794 dan penanam modal asing (PMA) sebanyak 1.820 tenaga kerja. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 sebanyak 12.946 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan realisasi investasi yang meningkat berpengaruh positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di kota bandung.

Berdasarkan informasi yang dilansir dalam website Portal Jabar pada tanggal 24 November 2024, Sekretaris DPMPTSP Jawa Barat, Deni Rusyana, menyatakan bahwa Kota Bandung menempati posisi kelima sebagai daerah dengan kontribusi investasi terbesar di wilayah Jawa Barat. Selain itu, Kota Bandung juga berhasil menduduki peringkat ke-1 jumlah pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) PMDN terbanyak Tingkat Provinsi Jawa Barat (Diskominfo, 2024). Keberhasilan DPMPTSP Kota Bandung sebagai bukti komitmen pemerintah meningkatkan investasi yang kondusif dan strategi pemerintah daerah yang tepat dalam menarik minat investor. Strategi yang diterapkan merujuk pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kepala BKPM No. 3 Tahun 2019 mengenai pedoman dan prosedur promosi investasi yaitu publikasi, pameran, forum bisnis, serta kegiatan publisitas sebagai strategi tambahan untuk menarik minat investor.

Pencapaian tersebut diawali oleh pelayanan perizinan usaha yang menjadi pintu masuk krusial bagi aliran modal dan ekspansi bisnis. Sebagai lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), DPMTSP memfasilitasi proses perizinan seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin lokasi, yang secara langsung mempengaruhi realisasi investasi dengan mengurangi birokrasi dan waktu proses. Data DPMTSP Kota Bandung (2023) menunjukkan bahwa pada 2023, waktu rata-rata perizinan usaha mencapai 7-14 hari, yang berkontribusi pada stagnasi investasi daerah sebesar 15-20% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dengan strategi seperti integrasi Online Single Submission (OSS) dan pendampingan, DPMTSP berpotensi meningkatkan realisasi investasi hingga

25%, seperti yang terlihat dalam tren 2024 di mana adopsi OSS naik 20% (DPMPTSP Kota Bandung, 2025).

Berdasarkan informasi yang dilansir dalam website Detik Jabar pada tanggal 6 Desember 2023, layanan Sakedap (Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan) menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Bandung dengan memberikan kemudahan perizinan, termasuk melalui fasilitas drive-thru di Mall Pelayanan Publik Kota Bandung. Sepanjang tahun 2023, layanan ini berhasil menerbitkan 33.961 Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara kumulatif, sejak diterapkannya sistem OSS berbasis risiko pada tahun 2021, total NIB yang diterbitkan telah mencapai 73.881. Capaian ini mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menetapkan Kota Bandung sebagai daerah dengan jumlah penerbitan NIB terbanyak (Aurellia, 2023).

Online Single Submission – Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai instrumen utama yang memfasilitasi proses perizinan satu pintu. Data dari Survei Publik Implementasi Pelayanan Perizinan Usaha Melalui OSS-RBA (2023) menunjukkan bahwa sebanyak 9,57 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan dari 4 Agustus 2021 hingga 2 Juli 2024, di mana 90% di antaranya merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produktif yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (DPMPTSP Kota Bandung, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa OSS-RBA tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga menjadi gerbang awal untuk peningkatan investasi, karena izin ini memungkinkan akses permodalan dan ekspansi bisnis yang lebih mudah.

Namun, meskipun memiliki potensi besar realisasi investasi di Kota Bandung belum mencapai potensi maksimalnya, karena masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang menonjol adalah fluktuasi pertumbuhan investasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Bandung juga masih dianggap belum optimal. Menurut berita di situs resmi DPMPTSP

Kota Bandung, tantangan dalam pelayanan perizinan mencakup ketidakmerataan informasi OSS-RBA yang menyebabkan kesalahan input data tidak sesuai kondisi riil usaha dan masih rendahnya kepatuhan pelaporan LKPM di kalangan pelaku usaha non-UMK (DPMPTSP Kota Bandung, 2025).

Sejak 28 Mei 2015, DPMPTSP telah meluncurkan aplikasi elektronik baru bernama HAYU Bandung. Aplikasi ini adalah sistem perizinan online yang tidak membutuhkan dokumen. Inovasi dalam pelayanan perizinan ini memastikan waktu, biaya, dan proses yang konsisten. Pelayanan DPMPTSP Kota Bandung unggul tanpa interaksi langsung antara petugas dan pemohon. Selain itu Pemkot Bandung, dari DPMPTSP memperkenalkan layanan yang disebut "GAMPIL". Layanan tersebut berupa perizinan berbasis smartphone. Ini adalah sistem perizinan yang fleksibel melalui sistem perizinan online. Aplikasi berbasis smartphone yang disebut "GAMPIL" bertujuan untuk meminimalkan persyaratan perizinan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Saat ini, aplikasi dapat diunduh melalui pencarian "GAMPIL" di Play Store. (DPMPTSP Kota Bandung, 2025). Namun dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis digital seperti OSS dan Hayu Gampil belum efektif akibat kendala teknis sistem LKPM yang sering error dan sosialisasi yang masih minim kepada investor.

Kondisi ini jika tidak segera ditangani, berpotensi menghambat perluasan basis investor lokal serta melemahkan daya saing daerah dalam jangka panjang. Selain itu, pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci terciptanya iklim investasi yang kondusif. Inovasi layanan perizinan, penyederhanaan prosedur, serta kecepatan dan transparansi proses sangat memengaruhi persepsi dan kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan belum tentu secara otomatis meningkatkan investasi, apabila tidak didukung oleh strategi yang terencana, terimplementasi dengan baik, serta dievaluasi secara berkelanjutan.

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu terkait strategi peningkatan investasi, namun penelitian terdahulu lebih fokus pada pencapaian target investasi, sedangkan penelitian ini menerapkan model lengkap Fred R. David (2011) yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi pada konteks pelayanan perizinan berbasis digital untuk mencapai peningkatan investasi di Kota Bandung. Lebih lanjut, aspek digitalisasi pelayanan perizinan dalam penelitian terdahulu belum dijadikan fokus utama sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing investasi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi DPMPTSP Kota Bandung dalam meningkatkan investasi melalui pelayanan perizinan berbasis digital.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di DPMPTSP Kota Bandung, menemukan tanda dan fenomena dalam strategi peningkatan investasi yang berfokus pada pengoptimalan teknologi dan media sosial. Sehingga DPMPTSP harus mampu memberikan layanan perizinan yang efektif dan efisien kepada para investor. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam merumuskan strategi. DPMPTSP sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan investasi memiliki peran strategis dalam menarik dan mempertahankan investasi melalui kebijakan yang efektif, inovasi layanan, serta promosi yang tepat sasaran.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji secara sistematis bagaimana strategi yang dirancang dan dijalankan oleh DPMPTSP Kota Bandung dalam mengoptimalkan pelayanan perizinan berbasis digital mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi daerah. Mengingat perizinan berusaha menjadi pintu gerbang utama investor PMDN/PMA, kajian mendalam terhadap strategi 3 tahap Fred R. David (perumusan, implementasi dan evaluasi) pada konteks digital ini sangat krusial. Di tengah persaingan global antar kota, investasi di kota Bandung perlu strategi perizinan preventif dan berbasis data LKPM real-time untuk

menciptakan iklim berusaha kompetitif, lapangan kerja berkualitas, serta Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang diangkat yaitu **“Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan Berbasis Digital di Kota Bandung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah investasi yang paling banyak di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi investasi yang besar di Jawa Barat, baik di tingkat provinsi maupun kota, khususnya Kota Bandung menjadi perhatian lebih dalam. Terjadi peningkatan yang melampaui target jumlah investasi daerah di DPMPTSP Kota Bandung pada tahun 2024.
2. Meskipun melampaui target tahun 2024, realisasi investasi Kota Bandung periode 2020–2024 menunjukkan tren yang tidak stabil, sehingga mengindikasikan belum optimalnya strategi peningkatan investasi yang diterapkan.
3. Efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Bandung juga masih belum optimal mencakup ketidakmerataan informasi OSS-RBA yang menyebabkan kesalahan input data tidak sesuai kondisi riil usaha dan masih rendahnya kepatuhan pelaporan LKPM di kalangan pelaku usaha non-UMK.
4. Belum optimalnya pelayanan berbasis digital (OSS-RBA, LKPM, Hayu Gampil), masih terdapat kendala teknis sistem, Integrasi digital yang belum menyeluruh dan kurangnya sosialisasi dan literasi digital investor.

5. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM serta kesalahan input data menyebabkan pencatatan investasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.

### **C. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian yaitu

1. Bagaimana perumusan strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi melalui optimalisasi pelayanan perizinan berbasis digital di Kota Bandung?
2. Bagaimana implementasi strategi pelayanan perizinan berbasis digital yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung peningkatan investasi daerah di Kota Bandung?
3. Bagaimana evaluasi strategi pelayanan perizinan berbasis digital yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi secara berkelanjutan Kota Bandung di Kota Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui perumusan strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi melalui optimalisasi pelayanan perizinan berbasis digital di Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui implementasi strategi pelayanan perizinan berbasis digital yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung peningkatan investasi daerah di Kota Bandung?

3. Untuk mengetahui evaluasi strategi pelayanan perizinan berbasis digital yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi secara berkelanjutan di Kota Bandung?

## **E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, terutama dalam ranah investasi di tingkat daerah dan pelayanan publik, serta memperkaya khazanah penelitian tentang strategi peningkatan investasi di daerah.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini sebagai wujud penerapan ilmu yang telah diperoleh peneliti selama menjalani perkuliahan di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sunan Gunung.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi DPMPTSP Kota Bandung dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi peningkatan investasi melalui pelayanan perizinan berbasis digital yang lebih efektif, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam upaya meningkatkan investasi di wilayah masing-masing.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Menyediakan informasi dan perspektif baru yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi. Membantu

investor dan masyarakat dalam memahami peran DPMPTSP serta prosedur investasi di Kota Bandung.

## **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian Penelitian ini didasarkan melalui observasi peneliti pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, bahwa jumlah investasi pada tahun 2024 telah meningkat dan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir masih terlihat adanya fluktuasi capaian investasi, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan perizinan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan investasi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang tersedia, tetapi juga oleh kesiapan pengguna layanan serta efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komponen pendukung investasi agar strategi yang diterapkan dapat berjalan secara optimal, sekaligus penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat investasi guna dicarikan solusi yang tepat.

Selain itu, dinamika tersebut juga mengindikasikan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik masih menghadapi tantangan, baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal, seperti literasi digital masyarakat dan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana strategi yang diterapkan tidak hanya mampu meningkatkan capaian investasi secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha.

Dalam mengkaji permasalahan ini, peneliti menggunakan tiga tingkatan teori yaitu grand theory, middle theory, dan applied theory. Teori-teori ini membantu menjelaskan fenomena yang diteliti dari sudut pandang yang luas hingga ke praktik teknis yang lebih spesifik. Pemilihan teori

dilakukan untuk memberikan landasan konseptual yang kuat, sekaligus alat analisis yang relevan dengan fokus penelitian.

Sebagai *grand theory*, digunakan teori Administrasi Publik, yang menjelaskan bagaimana organisasi pemerintahan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan publik. Dwight Waldo (1948) menyatakan bahwa administrasi publik mencakup proses manajemen dan organisasi sumber daya untuk mewujudkan kepentingan negara. Dalam konteks penelitian ini, DPMPTSP sebagai perangkat daerah bertugas melaksanakan pelayanan dan kebijakan yang mendukung peningkatan investasi sebagai bagian dari tujuan pembangunan ekonomi daerah.

Pada *middle theory*, penelitian ini menggunakan pendekatan New Public Management (NPM) yang diperkenalkan oleh Christopher Hood (1991) sebagai jembatan antara *grand theory* Administrasi Publik dengan konteks manajemen pelayanan publik modern. NPM menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, orientasi pada hasil (*performance-based management*), pengukuran kinerja, akuntabilitas, serta adopsi praktik manajerial sektor swasta ke dalam sektor publik. Pendekatan ini memandang pelayanan publik tidak hanya sebagai fungsi administratif, tetapi sebagai sistem manajemen yang harus menghasilkan output dan outcome yang terukur.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan NPM relevan untuk menganalisis bagaimana DPMPTSP Kota Bandung mengelola pelayanan perizinan berbasis digital secara lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada pencapaian target investasi. Optimalisasi sistem seperti Online Single Submission (OSS), percepatan waktu pelayanan, pengukuran realisasi investasi, serta evaluasi berbasis data LKPM mencerminkan karakteristik utama NPM, yaitu fokus pada kinerja dan pencapaian hasil. Dengan demikian, teori NPM memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai bagaimana strategi pelayanan perizinan berbasis digital

diimplementasikan sebagai instrumen peningkatan daya saing investasi daerah secara terukur dan akuntabel.

Sebagai applied theory, penelitian ini menggunakan teori Strategic Management dari Fred R. David (2011), yang menempatkan strategi sebagai proses manajerial yang sistematis dan terintegrasi melalui tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*). Kerangka ini dipilih karena mampu menganalisis strategi organisasi secara komprehensif, tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan hingga pengendalian kinerja.

Dalam konteks penelitian ini, tahap perumusan strategi menjadi landasan bagi DPMPTSP Kota Bandung untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis internal dan eksternal) dalam optimalisasi pelayanan perizinan berbasis digital guna meningkatkan investasi. Tahap implementasi strategi menekankan pada penerjemahan kebijakan ke dalam program konkret, penguatan sistem digital seperti OSS-RBA, pengelolaan sumber daya, serta koordinasi antarunit agar strategi yang dirancang benar-benar menghasilkan peningkatan realisasi investasi. Selanjutnya, tahap evaluasi strategi berfungsi sebagai mekanisme pengukuran kinerja melalui capaian target investasi, efektivitas pelayanan digital, serta akurasi pelaporan LKPM, sehingga memungkinkan adanya tindakan korektif dan penyempurnaan strategi secara berkelanjutan.

Dengan menggunakan model David (2011), penelitian ini tidak hanya menggambarkan strategi secara normatif, tetapi menganalisisnya secara struktural dan berbasis kinerja, sehingga mampu menjelaskan sejauh mana pelayanan perizinan berbasis digital benar-benar menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing dan investasi daerah.